

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Berdirinya PT. Kereta Api Indonesia

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan KA di desa Kemijen, Pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 1864, kereta api pertama di Indonesia lahir. Pembangunan diprakarsai oleh Nederlands-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) dengan rute Kemijen-Tanggung. Pencangkulan tanah pertama dilakukan di Desa Kemijen dan diresmikan oleh Mr. L.A.J.W. Baron Sloet van de Beele.

Namun jalur ini dibuka tiga tahun berikutnya, 10 Agustus 1867. Hingga tahun 1873 tiga kota di Jawa Tengah, yaitu Semarang, Solo, dan Yogyakarta sudah berhasil dihubungkan. Masa politik kolonial liberal rupanya mengakibatkan Pemerintah Belanda enggan mendirikan perusahaannya dan justru memberikan kesempatan luas bagi perusahaan-perusahaan (KA) swasta. Namun sayangnya, perusahaan swasta itu tidak memberikan keuntungan berarti (apalagi NIS masih membutuhkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kolonial), maka Departemen Urusan Koloni mendirikan operator KA lain, Staatsspoorwegen, yang membentang dari Buitenzorg hingga Surabaya.

Pertama dibangun di kedua ujungnya, jalur pertama di Surabaya dibuka pada tanggal 16 Mei 1878 dan terhubung pada tahun 1894. Selain itu, muncul juga lima belas operator KA swasta di Jawa yang menamakan dirinya sebagai "perusahaan trem uap", namun meskipun namanya demikian, perusahaan itu sudah dapat dianggap sebagai operator KA regional.

Sebagai perusahaan kolonial, sebagian besar jalur KA di Indonesia mempunyai dua tujuan: ekonomis dan strategis. Nyatanya, syarat bantuan keuangan NIS antara lain membangun rel KA ke Ambarawa, yang memiliki benteng bernama Willem I (yang diambil dari nama Raja Belanda).

Jalur KA negara pertama dibangun melalui pegunungan selatan Jawa, selain daerah datar di wilayah utara Jawa, untuk alasan strategis sama. Jalur KA negara di Jawa menghubungkan Anyer (lintas barat) menuju Banyuwangi (lintas timur).

Selain di Jawa, pembangunan rel KA juga dilakukan di Aceh, menghubungkan Banda Aceh hingga Pelabuhan Uleelhee, dengan lebar sepur 1.067 mm, yang digunakan untuk keperluan militer. Kemudian, lebar sepur yang sebelumnya 1.067 mm kemudian diganti menjadi 750 mm membentang ke selatan. Jalur ini kemudian berpindah kepemilikan dari Departemen Urusan Perang kepada Departemen Urusan Koloni tanggal 1 Januari 1916 menyusul perdamaian relatif di Aceh.

Ada pula jalur kereta api di Ranah Minangkabau (dibangun pada tahun 1891-1894) dan Sumatera Selatan (dibangun tahun 1914-1932). Kedua jalur ini digunakan untuk melintas layanan KA batu bara dari pertambangan bawah tanah menuju pelabuhan. Di Sumatera Utara, ada perusahaan KA bernama Deli Spoorweg Maatschappij yang banyak mengangkut karet dan tembakau di daerah Deli.

Pembangunan jalur kereta api juga diluncurkan di Sulawesi Selatan pada bulan Juli 1922 hingga 1930; sebagai bagian dari proyek besar-besaran pembangunan jalur rel di Kalimantan dan Sulawesi, menggabungkan sistem rel KA di Sumatera, serta elektrifikasi jalur KA utama di Jawa. Namun Depresi Besar telah membatalkan upaya ini. Meskipun tidak sempat dibangun, studi pembangunan jalur KA di Kalimantan, Bali, dan Lombok telah selesai dilakukan.

Semasa pendudukan Jepang, seluruh jalur KA (bahkan yang terpisah sekali pun) dikelola sebagai satu kesatuan. Sementara itu, di Sumatera, juga dikelola oleh cabang-cabang Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang, secara terpisah. Pendudukan Jepang akhirnya mengubah lebar sepur 1.435 mm di Jawa menjadi 1.067 mm, sebagai penyelesaian masalah lebar sepur ganda. Ini bukanlah "permasalahan nyata" karena tidak banyak perubahan materiil di kedua sistem itu, banyak rel 1.435 mm dipasang rel ketiga pada tahun 1940, menghasilkan rel dengan lebar sepur campuran.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, karyawan perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang.

Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI).

Kecuali DKA, ada operator KA lain yaitu Kereta Api Soematra Oetara Negara Repoeblik Indonesia dan Kereta Api Negara Repoeblik Indonesia (1953-1960), yang semuanya beroperasi di Sumatera.

Nama DKA pun berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PNKA) (1960-1970), semasa Orde Lama. Lalu, pada tanggal 28 September 1970 berubah menjadi Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA, Perjanka) (1970-1989). Kemudian, pada tanggal 28 September 1989, PJKA berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (Perumka) (1989-1995), dan semenjak tanggal 12 Agustus 1995, Perumka mulai menunjukkan keterbukaannya dan berubah menjadi PT Kereta Api (Persero) (PT KA) (1995-2010). Pada bulan 20 Mei 2010, nama PT KA berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) (2010-saat ini), hingga saat ini.

2.2 Logo dan Visi Misi Perusahaan

2.2.1 Logo PT. Kereta Api Indonesia



1. Bentuk

- a. Garis melengkung: Melambangkan gerakan yang dinamis PT KAI dalam mencapai Visi dan Misinya.
- b. Anak Panah: Melambangkan Nilai Integritas, yang harus dimiliki insan PT KAI dalam mewujudkan Pelayanan Prima.

2. Warna

- a. Orange: Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) yang ditujukan kepada pelanggan internal dan eksternal.
- b. Biru: Melambangkan semangat Inovasi yang harus dilakukan dalam memberikan nilai tambah ke stakeholders. Inovasi dilakukan dengan semangat sinergi di semua bidang dan dimulai dari hal yang paling kecil sehingga dapat melesat.

2.2.2 Visi PT. Kereta Api Indonesia

“Menjadi penyedia jasa perkereta apian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.”

2.2.3 Misi PT. Kereta Api Indonesia

“Menyelenggarakan bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya, melalui praktek bisnis dan model organisasi terbaik untuk memberikan nilai

tambah yang tinggi bagi stakeholders dan kelestarian lingkungan berdasarkan 4 pilar utama : Keselamatan, Ketepatan waktu, Pelayanan dan Kenyamanan.”

2.3 Budaya Perusahaan



1. Integritas (Integrity)

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai kebijakan organisasi dan kode etik perusahaan. Memiliki pemahaman dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan dan etika tersebut dan bertindak secara konsisten walaupun sulit untuk melakukannya.

2. Profesional (Professional)

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki kemampuan dan penguasaan dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan, mampu menguasai untuk menggunakan, mengembangkan, membagikan pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan kepada orang lain.

3. Keselamatan (Safety)

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) memiliki sifat tanpa kompromi dan konsisten dalam menjalankan atau menciptakan sistem atau proses kerja yang mempunyai potensi resiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan dan menjaga aset perusahaan dari kemungkinan terjadinya kerugian.

4. Inovasi (Innovation)

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) selalu menumbuh kembangkan gagasan baru, melakukan tindakan perbaikan

yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kondusif untuk berkreasi sehingga memberikan nilai tambah bagi stakeholder.

5. Pelayanan Prima (Excellent Service)

Kami insan PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) akan memberikan pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan pelanggan dengan memenuhi 6 A unsur pokok: Ability (Kemampuan), Attitude (Sikap), Appearance (Penampilan), Attention (Perhatian), Action (Tindakan), dan Accountability (Tanggung jawab).

2.4 Bidang Usaha Perusahaan

PT. Kereta Api Indonesia menjalankan usahanya dibidang bisnis perkeretaapian dan bisnis usaha penunjangnya yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders, meliputi :

2.4.1 Pelayanan Penumpang

Sebagai perusahaan yang mengelola perkeretaapian di Indonesia, PT. Kereta Api Indonesia (Persero) telah banyak mengoperasikan KA penumpangnya, baik KA Utama (Komersil dan Non Komersil), maupun KA Lokal di Jawa dan Sumatera, yang terdiri dari :

- a. KA Eksekutif
- b. KA Ekonomi AC
- c. KA Bisnis
- d. KA Campuran
- e. KA Lokal
- f. KRL

2.4.2 Angkutan Barang

Komoditi yang dapat dilayani pada angkutan barang, diantaranya :

- a. Petikemas

Paletisasi, Insulated and refrigerated containers, Standard containers, Hard-top containers, Open-top containers, Flatracks, Platforms (plats), Ventilated containers, Bulk containers, Tank containers.

- b. Barang Curah Liquid/Cair
BBM, CPO, Semua bahan kimia cair yang tidak korosif, Minyak goreng, air mineral dan lain-lain.
- c. Barang Curah
Batubara, pasir, semen, gula pasir, pupuk, beras, kricak, aspalt, klinker dan lain-lain.
- d. Barang Retail
Barang elektronik, hasil produksi pabrik yang sudah terpaket, barang kiriman hantaran, barang potongan.
- e. Barang Packaging
Semen, pupuk, gula pasir, beras, paletisasi.

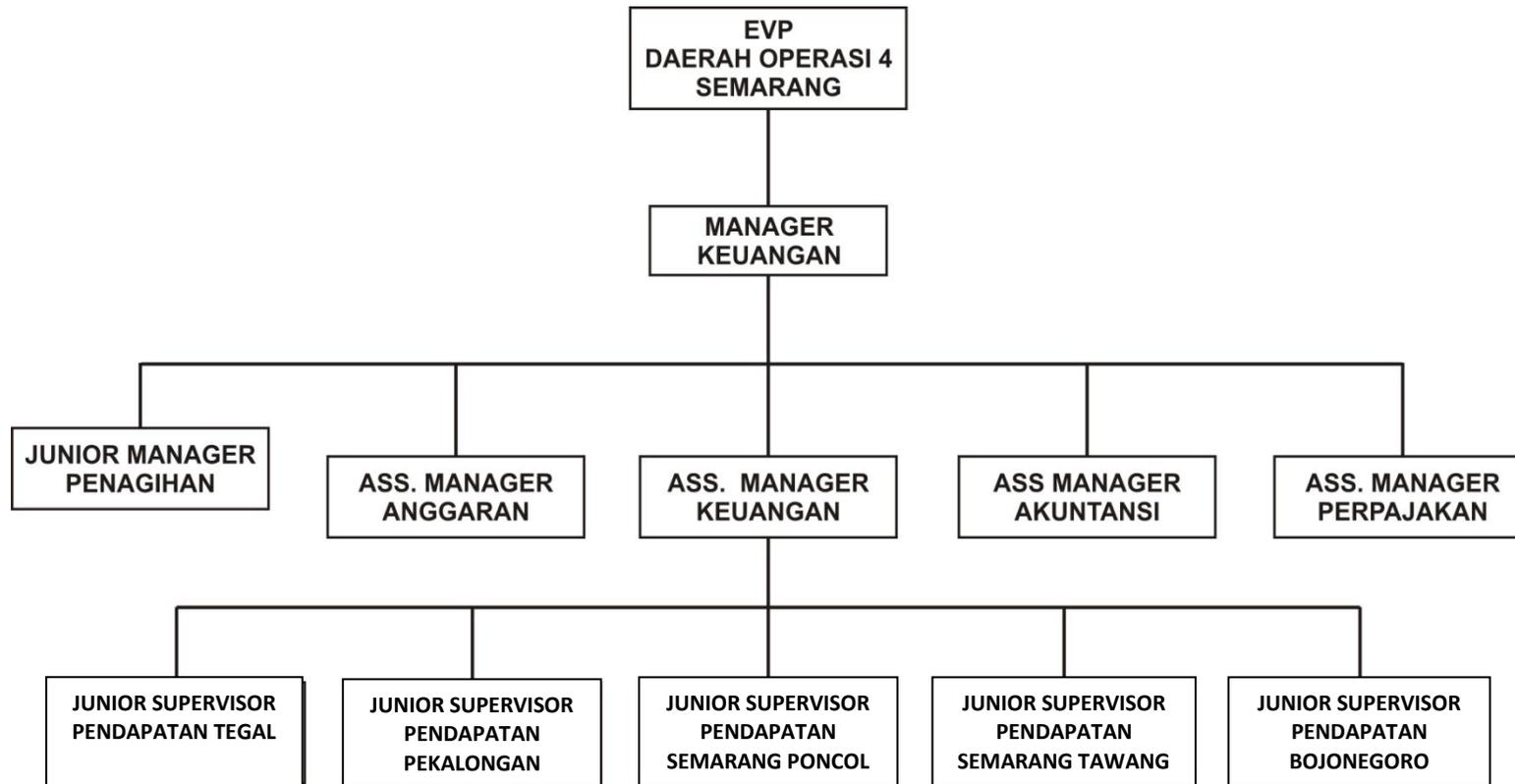
2.4.3 Pengusahaan Aset

Untuk melakukan sewa aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) anda mengikuti prosedur sewa sebagai berikut :

- a. Aset yang dapat disewa terdiri dari Aset Railway dan Aset Non Railway.
- b. Mengajukan permohonan sewa ke Manager komersial di daerah operasi terdekat.
- c. Menunjukkan SPPT PBB terbaru.
- d. Melakukan Pertemuan untuk Pembahasan rencana sewa-menyewa, Penentuan tarif dan Kesepakatan kerjasama.
- e. Peninjauan lokasi bersama. Proses kontrak.
- f. Penandatanganan kontrak kerjasama.

2.5 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi di dalam perusahaan diperlukan guna mempertegas pembagian tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab dari setiap pegawai.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 4 Semarang

2.6 Tugas dan Tanggung Jawab Seksi Keuangan

Dengan adanya tugas dan tanggung jawab diharapkan tidak terjadi kerancuan, baik kerancuan tugas dan wewenang maupun tanggung jawab dari setiap personil dalam organisasi. Seseorang yang memegang jabatan sebagai atasan tidak bertindak sewenang-wenang, sebaliknya pihak bawahan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya.

1. Tugas pokok dan tanggung jawab Manager Keuangan Daop 4 Semarang
 - a. Merumuskan penjabaran strategi dan kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang telah ditetapkan Kantor Pusat, di Wilayah Daerah Operasi 4 Semarang,
 - b. Terselenggaranya proses peningkatan kualitas (quality improvement) secara berkelanjutan serta pengelolaan resiko di Seksinya,
 - c. Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi 4 Semarang dan melaksanakan, mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran,
 - d. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi 4 Semarang serta pembinaannya,
 - e. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayarannon gaji pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan serta administrasi pelaksanaan petty cash,
 - f. Melaksanakan Administrasi Perpajakan,
 - g. Melaksanakan penagihan atas Piutang Angkutan Penumpang, Angkutan Barang dan Pengusahaan Aset (Rekening G.215/SAB) serta Tata Usaha Administrasi Piutang (Aging Schedule),
 - h. Melaksanakan tata laksana dan tata usaha perbendaharaan Daerah Operasi 4 Semarang,
 - i. Melaksanakan pemantauan, penyelesaian dan pelaporan tindak lanjut temuan Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.

Dalam menjalankan tugas pokok dan tanggung jawabnya, Manager Keuangan Daerah Operasi 4 Semarang dibantu oleh:

a. Junior Manager Penagihan

Junior Manager Penagihan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan penagihan atas Piutang Angkutan Penumpang, Angkutan Barang dan Perusahaan Aset (Rekening G.215/SAB) serta Tata Usaha Administrasi Piutang (Aging Schedule).

b. Assistant Manager Anggaran

Assistant Manager Anggaran mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab mengkoordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Daerah Operasi, melaksanakan mengendalikan dan melaporkan rencana serta pelaksanaan anggaran.

c. Assistant Manager Akuntansi

Assistant Manager Akuntansi mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Daerah Operasi.

d. Assistant Manager Keuangan

Assistant Manager Keuangan mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, pengesahan pembayaran non gaji pegawai, pengesahan pembayaran kepada pihak ketiga, serta penyelesaian dokumen analisa dan tata usaha keuangan, administrasi pelaksanaan petty cash serta melaksanakan tata laksanaan dan tata usaha perbendaharaan Daerah Operasi 4 Semarang.